

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Desember 2018/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET DAN INOVASI  
: NASIONAL  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : FAKULTAS TEKNIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TOTOK HERU TRI MARYADI**
2. Jabatan : **KETUA JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO**
3. NHK : **511971**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.050.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA	Rp.	200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI	Rp.	850.000.000
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>222.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	120.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	70.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI	Rp.	6.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	10.000.000
5. MOTOR, YAMAHA BISON Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	16.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>25.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>189.969.021</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.486.969.021</b>



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.486.969.021

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.